



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROBERIA**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **237787**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA BOGOR, LAINNYA Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , LAINNYA Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 45.000.005

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 123.305.934

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.298.305.939

III. HUTANG

Rp. 352.853.749

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.945.452.190

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.